

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan</i>					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Triliun	16,56	3,08	0,53	17,17%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Persentase	80%	20%	30,12%	150,60%
II	<i>Sasaran Kegiatan 2 Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran</i>					
2.1	Indikator 2.1 Tingkat Inflasi	Persentase	2,5% ±1%	2,5% ±1%	3,48%	100%
III	<i>Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Implementasi Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Optimal</i>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Kebijakan stimulus ekonomi yang terlaksana	Persentase	80%	80%	80%	100%
IV	<i>Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas</i>					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	Persentase	80%	20%	20%	100%

	kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN					
4.2	Indikator 4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan industri baja oleh BUMN	Persentase	80%	20%	20%	100%
4.3	Indikator 4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu	Persentase	80%	20%	20%	100%
4.4	Indikator 4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga	Persentase	80%	20%	20%	100%
4.5	Indikator 4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal	Persentase	80%	20%	25%	100%
4.6	Indikator 4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi	Persentase	80%	20%	20%	100%
V	Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas					
5.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Indeks	3 dari 4	4	4	100%
VI	Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Persentase	85%	20%	20%	100%

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan
---	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
2. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Latar Belakang

Belanja modal (*capital expenditure/capex*) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda industrialisasi nasional. Tingkat realisasi *capex* mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.

Upaya Pengembangan Usaha BUMN membutuhkan belanja modal (*capex*) yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong hal tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring pada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan sehingga target persentase realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar 60% berdasarkan *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dapat tercapai.

BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria di antaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, dan BUMN yang menerima PMN di tahun 2024 (sesuai UU nomor 19 tahun 2003). Rincian BUMN yang dikoordinasikan antara lain:

- a. PT Perkebunan Nusantara III / PTPN III (holding perkebunan) dengan target tahun 2026 **Rp 13,25 T**
- b. PT Biofarma (holding farmasi) dengan target tahun 2026 **Rp1,13 T**
- c. PT Biro Klasifikasi Indonesia / BKI (holding SURVEY ID) dengan target tahun 2026 **Rp0,73 T**
- d. PT LEN Industri (holding DEFEND ID) dengan target tahun 2026 **Rp1,45T**

Untuk mencapai target realisasi *capex*, BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan pencapaian belanja modal BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan.

Capaian realisasi belanja modal BUMN merupakan hasil dari akumulasi total nilai *capex* empat (empat) holding BUMN yang dikoordinasikan

$$\text{Realisasi IKU 1.1} = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$$

Dengan keterangan:

- X_1 = Belanja Modal holding sektor perkebunan
- X_2 = Belanja Modal holding farmasi
- X_3 = Belanja Modal holding jasa survei
- X_4 = Belanja Modal holding industri pertahanan

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar Rp16,56 Triliun, penetapan persentase realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar 60% didasarkan pada cascading dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target triwulanan ditetapkan berdasarkan persentase proyeksi realisasi dari Kementerian BUMN sebagai berikut.

Periode	Proyeksi KBUMN (%)	Target Deputy (Rp Triliun)	Target Asdep (Rp Triliun)
Triwulan I	18,60%	41,78	3,08
Triwulan II	40,10%	90,08	6,64
Triwulan III	61,00%	137,03	10,1
Triwulan IV	100,00%	224,64	16,56

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Belanja Modal (Capex) BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar Rp0,53 Triliun atau mencapai 3,19% dari target Tahun 2026 sebesar Rp16,56 Triliun dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Triliun	16,56	0,53	17,17 %

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi Belanja Modal BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan merupakan *cascading direct* dari realisasi belanja modal BUMN di level ke deputian yang ditargetkan sebesar 41,78 Triliun pada Triwulan I. Realisasi belanja modal (capex) BUMN di bawah koordinasi Asdep IMAFKA pada Triwulan

I masih relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan BPI Danantara terkait penundaan ekspansi bagi BUMN sebagai upaya untuk memperkuat fundamental BUMN melalui restrukturisasi dan konsolidasi.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Kebijakan penundaan ekspansi bagi BUMN berdampak kepada menurunnya Capex BUMN, khususnya pada sektor-sektor yang membutuhkan perhatian khusus seperti maskapai penerbangan, industri baja, proyek kereta cepat, dan perusahaan asuransi. Penundaan ekspansi ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi BPI Danantara dalam melakukan konsolidasi dan restrukturisasi BUMN.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Dengan tidak adanya lagi kebijakan penundaan ekspansi bagi BUMN di masa depan, intensitas koordinasi dan sinkronisasi dengan BUMN dalam pemantauan realisasi capex akan ditingkatkan, termasuk penguatan pemanfaatan data internal BUMN. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi capex secara bertahap pada Triwulan II dan seterusnya, sehingga target tahunan dapat dikejar. Penguatan strategi berbasis data juga akan digunakan dalam proyeksi pertumbuhan capex untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) hingga akhir tahun.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Inventarisasi rencana belanja modal dan identifikasi isu strategis yang menghambat capex BUMN bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	Terlaksana	Telah dilaksanakan identifikasi isu strategis BUMN Kesehatan dengan PT IHC pada Jumat, 27 Februari 2026
2.	Koordinasi persiapan modernisasi pabrik gula di bawah SugarCo	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi dengan SugarCo atau PT SGN pada tgl 16 Meret 2026 secara

			online bahwa di Tahun 2026, PT SGN memperoleh PMN sebesar Rp3,5 triliun terdiri dari : 1. Alokasi langsung = Rp350 miliar. 2. Alokasi melalui PTPN III = Rp3,15 triliun.
3.	Koordinasi persiapan percepatan pembangunan pabrik mobil nasional	Terlaksana	Telah dilakukan inisiasi Rapat bersama Direktur PT Pindad untuk membahas rencana awal tahapan proyek mobil nasional pada tanggal 5 Januari 2026.

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi, upaya lain yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah melalui koordinasi dengan unit kerja internal, Kementerian/Lembaga lainnya, dan BUMN guna memperoleh pembaruan isu strategis terkini sebagai bahan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Meski terdapat keterbatasan akibat efisiensi anggaran pada Triwulan I, koordinasi tetap dilakukan secara daring sebagai bentuk komitmen dalam memantau realisasi belanja modal (capex) BUMN di bawah koordinasi Asdep IMAFKA.

Efisiensi sumber daya:

Kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Kemenko Perekonomian selama Triwulan I mengharuskan penyesuaian dalam pemanfaatan sumber daya, termasuk pelaksanaan kegiatan pemantauan dan koordinasi yang dialihkan ke *platform* daring. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket *meeting*. Meskipun lebih hemat secara biaya, pendekatan ini kurang optimal untuk menggali informasi teknis mendalam terkait realisasi capex BUMN. Namun demikian, efisiensi ini mendorong internalisasi strategi kerja yang lebih adaptif dan selektif dalam pemanfaatan sumber daya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala pencapaian target::

Kendala utama pada Triwulan I meliputi keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan koordinasi lapangan dan minimnya ketersediaan data terkini dari BUMN, yang berdampak pada belum optimalnya identifikasi hambatan realisasi capex di

masing-masing entitas. Di sisi lain, beberapa BUMN juga belum menjadikan percepatan realisasi capex sebagai prioritas utama, mengingat kebijakan BPI Danantara. Sebagai bentuk upaya perbaikan, pemetaan awal terhadap kendala yang dihadapi masing-masing BUMN mulai dilakukan, serta akan disiapkan sistem pelacakan data capex yang lebih berkala dan terstruktur.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Untuk memastikan pencapaian target capex tahun berjalan, ke depan akan dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan sinkronisasi secara langsung dengan BUMN, seiring dengan normalisasi alokasi anggaran. Selain itu, akan diupayakan optimalisasi sistem pendataan realisasi capex secara triwulanan, termasuk validasi dan analisis tren pertumbuhan capex berdasarkan sektor dan kelompok BUMN. Upaya pemetaan masalah dan hambatan per BUMN juga akan diperkuat sebagai dasar penyusunan intervensi kebijakan percepatan realisasi capex yang lebih tepat sasaran.

1.2. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan

Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan. Dalam hal ini, penekanan khusus diberikan pada percepatan penyelesaian penugasan kepada PTPN III (Persero) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, yang bertujuan untuk mencapai swasembada gula nasional serta mendukung penyediaan Bioethanol sebagai bahan bakar nabati.

Penugasan pemerintah kepada PTPN III (Persero) yang dikoordinasikan diantaranya mencakup:

- a. Perluasan lahan tebu, dengan target 2026 sebesar **200.046 ha**
- b. Peningkatan produksi gula, dengan target 2026 sebesar **1,07 juta ton**
- c. Peningkatan rendemen gula, dengan target 2026 sebesar **7,35%**.

IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian energi melalui optimalisasi produksi gula dan bioethanol. Jika target ini tercapai, dampaknya tidak hanya pada sektor pertanian dan energi, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Untuk mencapai target penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan dilakukan melalui: kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan dan/atau rekomendasi kebijakan penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan.

Target penugasan dikatakan tercapai apabila mencapai 80% dari target tahun 2026.

Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan dihitung dengan.

Realisasi IKU 1.2

$$\text{Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah} = \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%, penetapan target tahun 2026 didasarkan *cascading direct* dari target Deputi. Adapun target triwulan sebesar 25% ditetapkan berdasarkan persentase triwulan tahun-tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 30,12% atau mencapai 37,65% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Persentase	80%	30,12%	150,60 %

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan merupakan *cascading direct* dari IKU nasional dalam mendukung program prioritas nasional dengan target akhir sebesar 80% pada tahun 2026.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Penguatan penugasan pemerintah terhadap BUMN khususnya di bidang agro berkontribusi pada stabilisasi pasokan bahan baku dan peningkatan efisiensi produksi, yang mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Dengan capaian triwulan ini dan rencana percepatan proses penguasaan pada triwulan berikutnya, diproyeksikan bahwa target tahunan sebesar 80% dapat tercapai. Koordinasi lintas kementerian dan dukungan kebijakan menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum capaian.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

**1.2 Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN
Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan**

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi bersama BUMN sektor agro terkait langkah konkret kebijakan percepatan swasembada gula	Terlaksana	Telah dilakukan koodinasi dengan PTPN III (Persero)/PT SGN pada tanggal 27 Maret 2026 terkait upaya percepatan swasembada gula melalui: 1. Konsolidasi antara ID Food dan PT SGN terkait merger atau penggabungan Pabrik Gula dari ID Food ke PT SGN. 2. Optimalisasi pengelolaan Lahan HGU dan Non-HGU PTPN. 3. Kerja sama kemitraan dengan petani tebu rakyat.
2.	Inventarisasi program dan rencana kerja BUMN Agro terkait swasembada gula	Terlaksana	Telah dilakukan koodinasi dengan PTPN III (Persero)/PT SGN pada tanggal 27 Maret 2026 terkait inventarisasi program dan rencana kerja percepatan swasembada gula sebagai berikut: 1. Peningkatan koordinasi lintas K/L dan pelaku usaha gula. Salah satunya pembahasan

			taksasi giling Tahun 2026. 2. Pemanfaatan lahan Perhutani melalui Kerja Sama Operasi (KSO). 3. Sewa lahan Non-HGU. 4. Peningkatan kerja sama kemitraan dengan Petani Tebu Rakyat dengan Sistem Bagi Hasil (SBH) dan Sistem Produksi Terpadu (SPT).
--	--	--	---

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Unit kerja telah melakukan identifikasi peran strategis dengan PTPN Group dan ID FOOD dalam penguatan ekosistem agro nasional dan pencapaian penugasan pemerintah, khususnya terkait komoditas pangan strategis dan hilirisasi produk perkebunan. Koordinasi intensif dilakukan dengan Kementerian BUMN untuk menyelaraskan arah kebijakan BUMN pangan dengan target ketahanan pangan nasional, seperti integrasi rantai pasok dan efisiensi logistik.

Efisiensi sumber daya:

Pemanfaatan data kinerja dan rencana bisnis yang telah tersedia, baik dari internal PTPN Group dan ID FOOD maupun dari Kementerian BUMN, memungkinkan proses analisis berjalan lebih cepat dan terarah, tanpa memerlukan riset primer tambahan berkat basis informasi yang telah tervalidasi. Sinergi dengan tim teknis Kementerian BUMN turut memperkuat akurasi rekomendasi kebijakan yang disusun, sekaligus mengurangi kebutuhan koordinasi lintas sektor yang kompleks.

Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring maupun *hybrid* melalui *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala pencapaian target:

- Perbedaan pendekatan bisnis antar-BUMN, khususnya antara entitas *holding* dan anak usaha, menimbulkan tantangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang bersifat lintas entitas dan tetap relevan secara operasional.
- Integrasi data yang belum optimal antara BUMN (PTPN Group dan ID FOOD) dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian BUMN, menghambat analisis rantai pasok secara menyeluruh dan berdampak pada akurasi proyeksi.
- Musim Giling di Triwulan I dimulai pada bulan Maret, sehingga menyebabkan capaian realisasi penugasan swasembada gula masih sangat rendah.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan identifikasi kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, dirumuskan sejumlah rekomendasi dan upaya perbaikan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya tersebut mencakup:

- Penguatan peran Kementerian BUMN sebagai pengarah sinergi BUMN pangan.
- Pengembangan sistem data terintegrasi antar-BUMN agro, untuk mendukung analisis berbasis *evidence* dan pengambilan keputusan strategis yang lebih akurat serta responsif terhadap dinamika lapangan.
- Penyelenggaraan forum koordinasi triwulanan antara unit kerja, Kementerian BUMN, BUMN terkait, dan K/L pendukung, guna memastikan rekomendasi kebijakan tetap relevan dan adaptif.
- Penyiapan infrastruktur dan sarana prasarana dalam kegiatan pemanenan tebu, pengangkutan, pengolahan, dan pengemasan gula yang dihasilkan dari tebu PTPN III.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Inflasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Tingkat Inflasi

Latar Belakang

Inflasi adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Data inflasi sangat mempengaruhi pengambilan berbagai kebijakan nasional. Inflasi menjadi salah satu indikator asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya. Di tingkat nasional pemanfaatan data inflasi diantaranya sebagai alat penyesuaian tingkat upah, jaminan sosial, pembayaran bunga, dan nilai kontrak, yang pada akhirnya akan berdampak pada keuangan negara.

Tingkat inflasi nasional yang terjaga dalam kisaran sasaran mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bahwa upaya pengendalian inflasi/stabilisasi harga berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, dimana pengeluaran tertinggi masyarakat miskin adalah untuk bahan pangan. Pada tahun 2026 sasaran inflasi ditetapkan sebesar 2,5% ± 1% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2026, Tahun 2026, dan Tahun 2027.

Dalam rangka memastikan pencapaian target inflasi di kisaran sasaran, dibutuhkan komitmen penuh dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara optimal. Upaya dan komitmen tersebut dituangkan dalam program kerja TPIP dalam strategi utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan target yang ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Dalam pelaksanaan proker TPIP, Asisten Deputi Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan sebagai wakil kepala sekretariat TPIP berperan dalam mengkoordinasikan program kebijakan yang berkaitan pengendalian inflasi dari Kementerian/Lembaga anggota TPIP maupun stakeholder strategis lainnya serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengendalian inflasi TPIP berjalan dengan efektif. Besaran Persentase inflasi yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2026 adalah: 2,5% ± 1%.

IKU Tingkat Inflasi dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_t: IHK periode ini

IHK_{t-1} = IHK periode sebelumnya

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 2,5% ± 1%, penetapan target tahunan dan triwulanan 2026 didasarkan pada Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2026, Tahun 2026, dan Tahun 2027.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, tingkat inflasi sebesar 3,48% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Tingkat Inflasi	Persentase	2,5% ±1%	3,48%	100%

Tingkat inflasi merupakan *cascading direct* dari Indikator Tingkat Inflasi pada level Deputi yang ditargetkan sama-sama sebesar 2,5% ± 1%. Pada Maret 2026 terjadi inflasi sebesar

3,48% (mtm), setelah sebelumnya mengalami deflasi 2 bulan secara beruntun. Inflasi Maret 2026 utamanya masih dipengaruhi oleh komoditas tarif listrik yang kembali normal (tanpa diskon) seiring dengan berakhirnya program pemberian diskon 50% dan mengalami inflasi sebesar 1,18%. Namun demikian, pelanggan pasca bayar masih mengalami penurunan harga atas konsumsi pada Maret 2026.

Inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan terkendali pada rentang sasaran dan berada pada titik tengah 2,60% (yoy) dengan batas atas 2,80% (yoy). Inflasi tahun 2026 diperkirakan akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, kebijakan moneter bank sentral negara maju, fluktuasi harga komoditas global baik energi maupun pangan, serta kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi hasil produksi komoditas pangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Tingkat Inflasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penetapan program kerja TPIP melalui strategi 4K dalam pengendalian inflasi 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan HLM TPIP Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Perekonomian tanggal 31 Januari 2026
2.	Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW IV 2025	Terlaksana	Telah disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui surat nomor : B/EK.02.01-117/M.EKON/04/2026

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian surat himbauan oleh Menko ke seluruh kepala daerah perihal Upaya Menjaga Stabilisasi Harga pada Momen Lebaran dan Hari Raya Idul Fitri 2026
2. Pelaksanaan capacity building dalam rangka pembinaan TPID maupun terkait evaluasi kinerja TPID
3. Pelaksanaan evaluasi kinerja TPID tahun 2025 yang dimulai sejak Januari 2026 hingga Mei 2026 dengan melakukan verifikasi dokumen penilaian
4. Pelaksanaan GNPIP dan Rakor TPIP-TPID di kawasan Jawa pada tanggal 21 Februari 2026

Efisiensi sumber daya:

Efisiensi anggaran pada Triwulan I berdampak pada menurunnya intensitas koordinasi, yang pada gilirannya membatasi optimalisasi peran Kemenko Perekonomian dalam mengawal terjaganya inflasi dalam kisaran sasaran. Inflasi yang cukup rendah pada triwulan I akan meningkat pada triwulan berikutnya karena stimulus daya beli sehingga masyarakat dapat kembali berbelanja. Langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi guna menjaga inflasi dalam kisaran sasaran antara lain dengan melaksanakan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring maupun *hybrid* melalui *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala pencapaian target:

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

1. Ketidakpastian ekonomi global yang berasal dari peningkatan tensi geopolitik dan konflik Timur-Tengah mendorong peningkatan harga komoditas global. Pelemahan nilai tukar akibat indeks dollar (DXY) yang menguat, serta harga emas global turut mendorong laju inflasi di banyak negara termasuk Indonesia
2. Pada Januari-Februari 2026 terjadi deflasi utamanya dipengaruhi oleh komoditas tarif listrik. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA-2200 VA selama bulan Januari-Februari 2026.
3. Kelompok *volatile food* (VF) mengalami peningkatan harga utamanya produk hortikultura yang dipengaruhi oleh keterbatasan produksi akibat gangguan cuaca seperti produksi bawang merah yang mengalami kendala akibat gangguan cuaca yang menyebabkan banjir di beberapa daerah sentra produksi terutama wilayah Pantura dan produksi cabai mengalami penurunan akibat gangguan cuaca yang terjadi di beberapa wilayah di antaranya di Jawa Tengah. Sementara peningkatan harga daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi dan beras didorong oleh kenaikan permintaan selama periode HBKN Idul Fitri.

4. Inflasi inti tetap stabil disumbang oleh kenaikan permintaan pada masa HBKN Idulfitri yang terbatas dan ekspektasi inflasi yang menurun di tengah kenaikan tekanan dari sisi eksternal yang tecermin dari peningkatan beberapa harga komoditas global, terutama emas, dan pelemahan nilai tukar.
5. Inflasi *administered price* (AP) didorong oleh adanya stimulus pemerintah untuk listrik dan jasa angkutan yang membawa kelompok AP mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dengan subtransi tematik per kawasan
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi kepada anggota TPIP maupun K/L terkait

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Implementasi Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Optimal

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Implementasi Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Optimal ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Kebijakan stimulus ekonomi yang terlaksana

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Kebijakan stimulus ekonomi yang terlaksana

Latar Belakang

Persentase Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Terlaksana adalah ukuran untuk menilai efektivitas dan kualitas pelaksanaan pemantauan serta evaluasi terhadap berbagai program stimulus ekonomi yang ditujukan untuk penguatan ekonomi masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara komprehensif, tepat waktu, akurat, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kebijakan.

IKU ini mengukur berbagai dimensi kualitas monitoring dan evaluasi, antara lain: (1) ketepatan waktu pelaporan dan pemantauan, (2) akurasi dan validitas data yang dikumpulkan, (3) cakupan dan kedalaman analisis terhadap dampak program, (4) kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, serta (5) tingkat responsivitas dalam menindaklanjuti temuan evaluasi. Penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri (self-assessment) dan verifikasi oleh tim independen terhadap dokumen monitoring, laporan evaluasi, serta implementasi tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi yang membidangi stimulus ekonomi berperan dalam mengkoordinasikan proses monitoring dan evaluasi bersama Kementerian/Lembaga pelaksana program stimulus, melakukan analisis capaian dan dampak program, serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan. Koordinasi lintas K/L diperlukan untuk memastikan data dan informasi yang komprehensif dapat dikumpulkan dan dianalisis secara holistik.

IKU Persentase Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Terlaksana dihitung dengan pembobotan beberapa indikator, di antaranya ketepatan waktu, akurasi data, dan analisis

dampak. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

Realisasi IKU 3.1 = (Skor Ketepatan Waktu × 20%) + (Skor Akurasi Data × 25%) + (Skor Analisis Dampak × 25%) + (Skor Kualitas Rekomendasi × 20%) + (Skor Responsivitas Tindak Lanjut × 10%)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%, penetapan persentase penyelesaian kebijakan peningkatan akselerasi ekonomi tahun 2026 sebesar 80% didasarkan pada cascading dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target triwulan I sebesar 80%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Kebijakan Peningkatan Akselerasi Ekonomi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 80% atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Penyelesaian Kebijakan Peningkatan Akselerasi Ekonomi	Persentase	80%	80%	100%

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Sebagai bagian dari upaya penguatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian penyelesaian kebijakan peningkatan akselerasi ekonomi, telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi diantaranya:

1. Rapat Eselon I Stimulus Diskon Transportasi tentang Evaluasi Implementasi Stimulus Diskon Transportasi Periode Nataru 2025/2026 dan Persiapan Implementasi Diskon Transportasi Periode Libur Idul Fitri 2026 pada tanggal 27 dan 28 Januari 2026.
2. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Stimulus Ekonomi Pada Tanggal 29 Januari 2026.
3. Rakorses Tindak Lanjut RTM dan Persiapan Pelaksanaan Stimulus Diskon Transportasi dan Work From Anywhere (WFA) Periode Lebaran Idul Fitri 2026M/1447H pada tanggal 30 Januari 2026.
4. Rakorses Tindak Lanjut Persiapan Pelaksanaan Stimulus Ekonomi: Diskon Transportasi, Pembatasan Angkutan Barang Periode Lebaran dan Idul Fitri 1447H/2026M pada tanggal 6 Februari 2026.
5. Rakor Es1 – Akselerasi Belanja Program Prioritas APBN untuk Mendorong Pertumbuhan Triwulan I-2026 pada tanggal 9 Februari 2026.

Di samping itu, terdapat beberapa rapat lain yang diikuti oleh Keasdepan Pengembangan BUMN bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Hasil koordinasi

tersebut antara lain berupa kesepakatan jadwal implementasi stimulus, penyempurnaan mekanisme pelaksanaan kebijakan, penetapan tindak lanjut lintas Kementerian/Lembaga, serta rekomendasi penyelesaian isu strategis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi pada periode berikutnya

Dokumen risalah rapat dan substansi yang dibahas menjadi **data dukung utama** atas tercapainya indikator kinerja ini, yang mencerminkan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dalam mendukung implementasi kebijakan stimulus ekonomi secara efektif, tepat waktu, dan terkoordinasi.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan stimulus ekonomi pada Triwulan I Tahun 2026 telah meningkatkan kualitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian implementasi kebijakan stimulus ekonomi antar Kementerian/Lembaga. Melalui berbagai forum koordinasi yang dilaksanakan, telah dihasilkan kesepakatan mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan, pembagian peran dan tanggung jawab, penyelesaian isu strategis lintas sektor, serta langkah tindak lanjut yang mendukung implementasi kebijakan secara tepat waktu dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Di samping itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap berbagai isu pelaksanaan, sehingga rekomendasi kebijakan dapat disusun secara lebih komprehensif, tepat sasaran, dan responsif terhadap dinamika perekonomian. Rekomendasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan implementasi kebijakan stimulus ekonomi pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 telah mendukung kesiapan pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi secara lebih efektif, terkoordinasi, tepat waktu, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi kebijakan ekonomi nasional. Dengan demikian, capaian IKU tidak hanya mencerminkan terlaksananya kegiatan koordinasi, tetapi juga peningkatan kualitas tata kelola implementasi kebijakan stimulus ekonomi melalui koordinasi lintas sektor yang lebih efektif dan akuntabel.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

- Triwulan I: Target triwulanan telah tercapai sebesar 80% sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan.
- Triwulan II dan III: Target triwulanan dapat tercapai sebesar 80% sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan. Difokuskan pada pengawalan implementasi kebijakan stimulus ekonomi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, identifikasi isu strategis, serta penyusunan rekomendasi kebijakan guna memastikan target tahunan tetap berada pada jalur pencapaian.
- Triwulan IV: Target triwulanan dapat tercapai sebesar 80% sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan. Difokuskan pada penyelesaian monitoring dan evaluasi tahunan, finalisasi rekomendasi kebijakan, serta pemenuhan target IKU tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Penyelesaian Kebijakan Peningkatan Akselerasi Ekonomi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat koordinasi terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Tw I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat 1. Rapat Eselon I Stimulus Diskon Transportasi tentang Evaluasi Implementasi Stimulus Diskon Transportasi Periode Nataru 2025/2026 dan Persiapan Implementasi Diskon Transportasi Periode Libur Idul Fitri 2026 pada tanggal 27 dan 28 Januari 2026. 2. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Stimulus Ekonomi Pada Tanggal 29 Januari 2026. 3. Rakorses Tindak Lanjut RTM dan Persiapan Pelaksanaan Stimulus Diskon Transportasi dan Work From Anywhere (WFA) Periode Lebaran

			Idul Fitri 2026M/1447H pada tanggal 30 Januari 2026. 4. Rakorses Tindak Lanjut Persiapan Pelaksanaan Stimulus Ekonomi: Diskon Transportasi, Pembatasan Angkutan Barang Periode Lebaran dan Idul Fitri 1447H/2026M pada tanggal 6 Februari 2026. 5. Rakor Es1 – Akselerasi Belanja Program Prioritas APBN untuk Mendorong Pertumbuhan Triwulan I-2026 pada tanggal 9 Februari 2026. 6. Konferensi Pers Para Menteri terkait Capaian Ekonomi Tahun 2025, Stimulus Ekonomi Diskon Tarif Transportasi HBKN Idul Fitri, WFA dan Bantuan Pangan pada Tanggal 10 Februari 2026
2.	FGD dengan Ekonom terkait stimulus ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Terlaksana	FGD Outlook dan Strategi Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2026 dengan Para Ekonom dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN pada

			tanggal 7 Januari 2026
3.	Kegiatan Policy Outreach Forum: Kebijakan Ekonomi Berkualitas dan Peningkatan Produktivitas SDM Muda Unggul	Terlaksana	1. Policy Outreach Forum di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 12 Februari 2026 2. Policy Outreach Forum di Universitas Nahdatul Ulama Surabaya pada tanggal 5 Maret 2026

Pelaksanaan rangkaian rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD), dan Policy Outreach Forum pada Triwulan I Tahun 2026 saling melengkapi dalam mendukung pencapaian IKU. Rapat koordinasi dari tingkat menteri hingga teknis menghasilkan penyelarasan langkah implementasi kebijakan dan tindak lanjut lintas Kementerian/Lembaga, FGD memperkaya substansi kebijakan melalui masukan dari para ekonom dan praktisi, sedangkan Policy Outreach Forum memperluas diseminasi kebijakan kepada akademisi dan generasi muda. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi landasan dalam penyempurnaan implementasi kebijakan stimulus ekonomi pada periode berikutnya.

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga pelaksana guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan stimulus ekonomi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi serta menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan kebijakan.

Efisiensi sumber daya:

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, penggunaan forum koordinasi yang telah ada, serta pemanfaatan media rapat daring dan luring sesuai kebutuhan. Pendekatan tersebut memungkinkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berjalan secara efektif dan efisien tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Sinergi antar Kementerian/Lembaga juga menghindari duplikasi pembahasan dan meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala pencapaian target:

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Perbedaan tingkat kesiapan Kementerian/Lembaga dalam penyampaian data dan informasi pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi.
- Dinamika perkembangan kondisi ekonomi serta perubahan kebutuhan kebijakan yang memerlukan penyesuaian dan koordinasi lintas sektor secara cepat.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

- Meningkatkan intensitas koordinasi, memperkuat koordinasi sejak tahap perencanaan sehingga potensi permasalahan implementasi dapat diidentifikasi lebih awal, dan monitoring bersama Kementerian/Lembaga pelaksana guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana.
- Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi melalui penyempurnaan sistem pelaporan, percepatan penyampaian data, serta peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program.

4

Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian enam indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan industri baja oleh BUMN
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu
4. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga
5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Sektor Eksternal
6. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti

oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN yaitu:

- Sinkronisasi roadmap dan target kemandirian BBO nasional melalui forum koordinasi antar-K/L dan BUMN
- Penguatan peran Holding BUMN Farmasi (Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma) dalam pengembangan dan investasi BBO strategis;
- Fasilitasi percepatan proyek produksi BBO di dalam negeri, seperti operasionalisasi pabrik BBO PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) dan perluasan kapasitas produksi BBO;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan evaluasi capaian produksi, efisiensi rantai pasok, dan utilisasi kapasitas industri BBO milik BUMN;
- Tugas atau fungsi lainnya adalah tugas di luar poin di atas, sebagai tindak lanjut arahan presiden atau menteri pada tahun berjalan (ad hoc).

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan BBO (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program \
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan BBO (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- Rumusan kelembagaan,
- Rumusan perencanaan program,
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait BBO (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan

- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan BBO (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan I, 40% untuk triwulan III, 60% untuk triwulan III, dan 80% untuk triwulan IV.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 20% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN	Persentase	20%	20%	100% (Memuaskan)

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi kinerja **IKU-4.1 (Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN)** pada Triwulan I berhasil mencapai **20%** dari target yang ditetapkan sebesar **20%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan efektivitas organisasi dalam menyelaraskan dan mengendalikan kebijakan kemandirian serta ketersediaan bahan baku obat nasional melalui BUMN.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi, rencana aksi, atau instrumen kebijakan resmi terkait percepatan kemandirian dan tata kelola Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN farmasi pada Tw I.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi, serta Notulen Rapat (Minutes of Meeting) koordinasi berkala bersama jajaran kluster BUMN farmasi, kementerian kesehatan/teknis, dan BPOM.

- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring progres riset/produksi BBO dalam negeri, evaluasi serapan bahan baku, serta matriks pengendalian implementasi kebijakan BBO di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Sinkronisasi kebijakan mendorong peningkatan kapasitas produksi BBO domestik oleh BUMN, sehingga secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan ekstrem Indonesia terhadap impor bahan baku farmasi global. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya stabilitas pasokan obat-obatan nasional, penurunan biaya produksi obat yang membuat harga obat lebih terjangkau bagi masyarakat luas, serta peningkatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi krisis kesehatan di masa depan.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

- **Triwulan I:** Telah dicapai 1 kegiatan koordinasi strategis utama (Rapat Program dan Kegiatan Holding Kesehatan Tahun 2026), yang berkontribusi terhadap awal pemetaan isu BUMN Kesehatan.
- **Triwulan II dan III:** Akan difokuskan pada pelaksanaan *follow-up meeting* dengan BIH dan BUMN Farmasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dan mekanisme pengembangan BBO, pemanfaatan fitofarmaka, dan pengembangan daya saing obat tradisional, bersama K/L teknis dan asosiasi industri.
- **Triwulan IV:** Ditargetkan adanya finalisasi kebijakan strategis dan mengawal tahap awal implementasi, dengan fokus pada utilisasi data BUMN farmasi dan koordinasi antar instansi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi permasalahan kebijakan Pengembangan Bahan Baku Obat	Terlaksana	• FGD dengan maksud memastikan program dan kegiatan pada PT Pertamina Bina Medika IHC sebagai Induk Holding BUMN Rumah Sakit dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Waktu dan tempat: Jumat, 27

			Februari 2026 (pukul 09.00 WIB – selesai). Hotel Trembesi, Tangerang Selatan. • Peninjauan langsung untuk melihat perkembangan operasional dan kesiapan layanan Bali International Hotel (BIH) yang berstandar internasional di KEK Kesehatan Sanur. Diskusi terkait kinerja dan rencana pengembangan BIH, termasuk kebutuhan investasi dan pengadaan alat kesehatan, kerja sama dengan mitra internasional, serta tantangan dan kebijakan lainnya. Waktu dan tempat: Rabu, 11 Maret 2026 (pukul 13.00 WITA – selesai). Bali International Hospital, Sanur Bali
--	--	--	---

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah:

- Merumuskan hasil kunjungan kerja ke Bali Internasional Hospital untuk mendorong pengembangan *medical tourism* di Indonesia dan menindaklanjuti perkembangan operasional KEK Kesehatan Sanur.

Efisiensi sumber daya:

Kegiatan sebagian besar dilaksanakan secara virtual melalui platform *Zoom Meeting*, sehingga mampu menekan biaya perjalanan dinas dan penggunaan sumber daya lainnya, namun tetap memastikan partisipasi aktif dan efektivitas pencapaian tujuan kegiatan. Kisaran anggaran yang dapat dihemat sebesar Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala utama yang dihadapi PT IHC yaitu PT IHC menghadapi berbagai tantangan operasional dan finansial, salah satunya adalah integrasi hulu-hilir dengan holding farmasi yang belum optimal dalam hal proses bisnis, pertukaran data, dan komitmen *offtake*. Secara finansial, perusahaan mengalami tekanan

akibat margin yang menipis dari ketatnya tarif INA-CBG pada sistem JKN, kewajiban pembayaran vendor yang menghambat aktivasi alat kesehatan canggih, serta besarnya kebutuhan investasi untuk teknologi dan SDM spesialis. Kondisi ini diperberat oleh tingginya ketergantungan pada impor bahan baku obat dan alat kesehatan, hambatan regulasi seperti pajak alkes dan pembatasan izin praktik dokter, hingga kendala mobilisasi dokter spesialis untuk mendukung layanan unggulan kelas dunia.

Upaya perbaikan pencapaian target:

- Memperkuat sinergi antara Holding Farmasi (Bio Farma Group) dan IHC melalui mekanisme *offtake*, perencanaan kebutuhan (*demand forecasting*), serta integrasi rantai pasok nasional.
- Mendukung penyusunan roadmap BBO nasional. Melalui jaringan rumah sakit yang luas, IHC dapat menyediakan data kebutuhan obat dan alat kesehatan sebagai dasar perencanaan pengembangan BBO nasional.

4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja, Otomotif, dan Semikonduktor oleh BUMN

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan industri baja oleh BUMN. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Industri baja merupakan sektor strategis yang menjadi fondasi pembangunan infrastruktur, industri manufaktur, alat berat, pertahanan, dan sektor konstruksi nasional. Dalam konteks ini, kebijakan industri baja diarahkan untuk memperkuat kemandirian industri hulu dan antara, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan daya saing produk baja nasional. Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan industri baja oleh BUMN, yaitu:

- Sinkronisasi kebijakan pengembangan industri baja nasional yang melibatkan BUMN strategis seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan anak usahanya;
- Melakukan pemantauan dan koordinasi atas proses restrukturisasi dan transformasi bisnis PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, guna mendukung peningkatan efisiensi operasional, perbaikan kinerja keuangan, serta optimalisasi kapasitas produksi industri baja nasional ;
- Koordinasi kebijakan penguatan ekosistem industri baja nasional, termasuk pengembangan klaster baja hulu serta baja hilir bernilai tambah;

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan industri baja (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan industri baja (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait industri baja(1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permen/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan industri baja (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan I, 40% untuk triwulan III, 60% untuk triwulan III, dan 80% untuk triwulan IV.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan industri baja oleh BUMN yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 20% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Kinerja
IKU-4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja,	Persentase	20%	20%	100 % (Memuaskan)

Otomotif, dan Semikonduktor oleh BUMN				
---	--	--	--	--

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi kinerja **IKU-4.2 (Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja, Otomotif, dan Semikonduktor oleh BUMN)** pada Triwulan I berhasil mencapai **20%** dari target yang ditetapkan sebesar **20%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat "**Memuaskan**" yang mencerminkan efektivitas organisasi dalam menyelaraskan dan mengendalikan kebijakan pengembangan industri strategis tersebut.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi, keputusan, atau instrumen kebijakan resmi terkait peta jalan (roadmap) dan pengembangan industri baja, otomotif, serta semikonduktor yang melibatkan BUMN pada Tw I.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi, serta Notulen Rapat (Minutes of Meeting) koordinasi bersama kementerian teknis, jajaran direksi BUMN terkait, dan mitra industri.
- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring perkembangan industri strategis berkala, evaluasi hambatan investasi/produksi, serta matriks pengendalian implementasi kebijakan di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Penyelarasan kebijakan ini memperkuat kemandirian industri nasional melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor strategis, serta memitigasi risiko kelangkaan komponen global seperti cip semikonduktor. Capaian ini juga memperkuat *policy alignment* antara pemerintah dan BUMN dalam menghadapi tekanan pasar global dan mempercepat transformasi industri baja berbasis efisiensi dan teknologi rendah karbon (green steel).

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Realisasi Triwulan I 2026 sebesar 20%, sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas koordinasi awal lintas K/L dan BUMN terkait, sebagai fondasi untuk memperkuat formulasi kebijakan dan implementasi program di triwulan berikutnya

- **Triwulan I:** Telah dicapai 1 kegiatan koordinasi strategis utama (rapat program kerja PTKS), yang berkontribusi terhadap awal pemetaan isu dan rencana aksi kebijakan industri baja nasional.
- **Triwulan II dan III:** Akan difokuskan pada pelaksanaan *follow-up meeting* dengan BUMN industri sektor baja di sisi hilir, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dan mekanisme pengendalian impor bersama K/L teknis dan asosiasi industri.

- **Triwulan IV:** Ditargetkan adanya finalisasi kebijakan strategis dan pemantauan implementasi awal, termasuk integrasi data utilisasi BUMN industri baja dan pelaporan sinkronisasi lintas pihak.

Dengan pendekatan ini, **target tahunan IKU diproyeksikan tercapai**, mengingat bahwa pertemuan strategis di awal tahun telah membuka jalur koordinasi substansial dan berkelanjutan, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan kebutuhan aktual industri.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan industri baja oleh BUMN			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi dan inventarisasi kebijakan, program, dan penugasan strategis BUMN pada sektor industri baja, otomotif, dan semikonduktor	Terlaksana	Telah dilakukan rapat koordinasi bersama Direktur PT Pindad dan Bapak Deputi untuk pembahasan awal tahapan proyek mobil nasional pada tanggal 5 Januari 2026 yg membahas tahapan awal timeline perencanaan proyek mobnas dan rencana status PNM, dan identifikasi awal insentif fiskal yang bisa diberikan oleh pemerintah.

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi tahunan, upaya nyata yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah penyelenggaraan rapat koordinasi pembahasan pengembangan **Proyek Mobil Nasional** pada **5 Januari 2026** bersama Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Rapat difokuskan pada pembahasan perkembangan rencana produksi kendaraan listrik nasional, kesiapan pembangunan fasilitas manufaktur di Subang, identifikasi kebutuhan dukungan kebijakan lintas kementerian/lembaga, serta berbagai isu strategis yang perlu mendapat fasilitasi pemerintah, antara lain percepatan penyelesaian lahan, perizinan, insentif fiskal, pengadaan prototipe, dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Hasil koordinasi ini menjadi bahan awal dalam penyusunan langkah koordinasi lanjutan guna mendukung percepatan implementasi Proyek Mobil Nasional.

Efisiensi sumber daya:

Rapat koordinasi dilakukan secara langsung namun dengan partisipasi yang efisien, melibatkan perwakilan internal Kemenko Perekonomian dan jajaran manajemen PT Pindad yang relevan. Proyeksi efisiensi anggaran diperkirakan dapat mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan. Diskusi difokuskan pada isu prioritas dan solusi strategis yang berdampak sistemik terhadap industri mobil nasional, sehingga meminimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan non-substantif. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi hasil melalui penggalan informasi teknis mendalam dan perumusan aksi tindak lanjut yang terukur dalam satu pertemuan intensif.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Salah satu kendala dalam pencapaian target IKU adalah masih diperlukannya **sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga** untuk mendukung percepatan implementasi Proyek Mobil Nasional. Beberapa isu yang masih memerlukan koordinasi lebih lanjut antara lain penyelesaian proses pembebasan lahan dan perizinan pembangunan kawasan industri, penyusunan skema insentif fiskal pada fase pengembangan produk, percepatan proses impor prototipe dan komponen untuk kegiatan *research and development* (R&D), serta harmonisasi proses sertifikasi kendaraan listrik. Selain itu, penetapan status Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penyelarasan tahapan implementasi dengan berbagai pemangku kepentingan masih memerlukan koordinasi lanjutan agar target pengembangan produk dan pembangunan fasilitas produksi dapat berjalan sesuai rencana. Sebagai upaya perbaikan, Kemenko Perekonomian terus memfasilitasi koordinasi lintas K/L dan BUMN untuk mengidentifikasi hambatan, menyelaraskan kebutuhan dukungan kebijakan, serta mendorong percepatan penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi prasyarat implementasi Proyek Mobil Nasional.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Sebagai langkah perbaikan dan percepatan pencapaian target IKU, dirumuskan beberapa rekomendasi, antara lain:

- **Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga** untuk mempercepat penyelesaian isu strategis Proyek Mobil Nasional, termasuk proses pembebasan lahan, perizinan pembangunan fasilitas produksi, serta dukungan terhadap tahapan pengembangan produk dan manufaktur;
- **Mendorong harmonisasi kebijakan fiskal dan nonfiskal** yang mendukung pengembangan industri kendaraan listrik nasional, antara lain melalui pembahasan insentif perpajakan, fasilitas impor terbatas untuk kebutuhan riset dan pengembangan (*research and development*), serta penguatan kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- **Memfasilitasi koordinasi dengan kementerian teknis terkait** guna mendukung percepatan proses sertifikasi kendaraan listrik, standardisasi produk, dan penyusunan regulasi yang dapat memperkuat daya saing industri otomotif nasional;

- **Mendorong penguatan ekosistem industri dan kemitraan strategis** dengan penyedia teknologi, produsen komponen, dan pelaku industri pendukung guna mendukung transfer teknologi, pengembangan rantai pasok domestik, serta peningkatan kapasitas produksi kendaraan nasional;
- **Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala** terhadap progres pelaksanaan Proyek Mobil Nasional untuk memastikan keselarasan antara target pengembangan produk, pembangunan fasilitas produksi, dan dukungan kebijakan pemerintah.

4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu

Latar Belakang

Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait peningkatan sumber bahan baku berbasis tebu merupakan alat ukur untuk mengetahui sejauh mana proses perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan lintas sektor dilakukan secara terkoordinasi dan selaras dalam mendukung ketersediaan bahan baku tebu nasional.

Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dikategorikan efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari proses tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait, serta tercermin dalam dukungan nyata terhadap program peningkatan produksi dan/atau penyerapan bahan baku tebu dalam negeri.

Hasil dari proses ini selanjutnya dievaluasi melalui penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara berkala, yang mencakup capaian implementasi kebijakan, hambatan pelaksanaan, dan langkah korektif untuk optimalisasi kebijakan.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu, yaitu:

- **Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Penyediaan Bahan Baku Etanol Berbasis Tebu oleh PTPN III** melalui koordinasi lintas pihak, dilakukan identifikasi tantangan serta penyusunan langkah percepatan penyediaan bahan baku tebu untuk etanol di lahan milik PTPN III.
- **Identifikasi dan Pemetaan Potensi Lahan (HGU dan non-HGU).** Upaya ini dilakukan untuk merumuskan rekomendasi pemanfaatan lahan secara optimal bagi pengembangan tebu, termasuk lahan eksisting dan non-HGU yang strategis.
- **Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Eksisting.** Dilakukan monitoring terhadap penggunaan lahan eksisting PTPN III untuk memastikan dukungan terhadap produksi bahan baku etanol berbasis tebu yang berkelanjutan.
- **Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan.** Koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan untuk memastikan keselarasan kebijakan tata guna lahan, pengelolaan HGU, serta dukungan fiskal atau teknis terhadap program peningkatan produksi tebu nasional.
- **Evaluasi Kebijakan Tahunan.** Evaluasi akhir tahun dilaksanakan untuk mengkaji capaian, hambatan, serta rekomendasi tindak lanjut atas

pelaksanaan kebijakan penyediaan bahan baku tebu oleh PTPN III, yang hasilnya menjadi bagian dari indikator efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputy dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputy dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan I, 40% untuk triwulan III, 60% untuk triwulan III, dan 80% untuk triwulan IV.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis

Tebu yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 25% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Kinerja
IKU-4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu	Persentase	20%	20%	100% (Memuaskan)

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja

Realisasi kinerja **IKU-4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu** pada Triwulan I berhasil mencapai **20%** dari target yang ditetapkan sebesar **20%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan efektivitas organisasi dalam menyelaraskan dan mengendalikan kebijakan peningkatan sumber bahan baku berbasis tebu. Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi, surat keputusan, atau instrumen kebijakan resmi terkait program peningkatan dan pengembangan sumber bahan baku tebu.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi, serta Notulen Rapat (Minutes of Meeting) koordinasi bersama para pemangku kepentingan (seperti petani, pabrik gula, atau instansi terkait).
- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring luasan lahan/produksi tebu berkala, evaluasi pasokan, serta matriks pengendalian implementasi kebijakan komoditas tebu di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Rumusan kebijakan dan bahan evaluasi yang dihasilkan menjadi acuan bersama dalam mendukung program peningkatan bahan baku berbasis tebu. Dampak dari capaian kinerja tersebut adalah terbangunnya kesepahaman lintas sektor, penguatan arah kebijakan, dan kesiapan implementasi program strategis berbasis tebu.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Realisasi Triwulan I 2026 sebesar 20%, sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas koordinasi awal lintas K/L dan BUMN terkait, sebagai fondasi untuk memperkuat formulasi kebijakan dan implementasi program di triwulan berikutnya.

- **Triwulan I:** Telah dicapai 1 kegiatan koordinasi strategis utama (rapat program kerja PTKS), yang berkontribusi terhadap awal pemetaan isu dan rencana aksi kebijakan industri baja nasional.
- **Triwulan II dan III:** Akan difokuskan pada pelaksanaan *follow-up meeting* dengan BUMN industri sektor baja di sisi hilir, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dan mekanisme pengendalian impor bersama K/L teknis dan asosiasi industri.
- **Triwulan IV:** Ditargetkan adanya finalisasi kebijakan strategis dan pemantauan implementasi awal, termasuk integrasi data utilisasi BUMN industri baja dan pelaporan sinkronisasi lintas pihak.

Dengan pendekatan ini, **target tahunan IKU diproyeksikan tercapai**, mengingat bahwa pertemuan strategis di awal tahun telah membuka jalur koordinasi substansial dan berkelanjutan, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan kebutuhan aktual industri.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi permasalahan kebijakan perluasan lahan tebu dari konversi lahan HGU PTPN III dan lahan non-HGU.	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan kunjungan lapangan yang berkaitan dengan perluasan lahan tebu PTPN III di Pekalongan tanggal 11 Maret 2026.

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja, antara lain:

- Mengidentifikasi hambatan on-farm dan off-farm yang menjadi hambatan dalam melakukan perluasan lahan tebu.

- Menginventarisir adopsi teknologi atau penyiapan infrastruktur yang dibutuhkan.
- Koordinasi intensif dengan K/L dan BUMN terkait yang dapat mendukung percepatan perluasan lahan tebu.

Efisiensi sumber daya:

Efisiensi sumber daya diupayakan melalui integrasi program lintas K/L yang saling melengkapi, penghindaran duplikasi kegiatan, serta penyederhanaan proses perizinan dan birokrasi. Pemanfaatan anggaran dan SDM difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ketersediaan bahan baku berbasis tebu, dengan dukungan teknis dan fasilitasi dari Kemenko untuk memperkuat kapasitas pelaksana di lapangan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala pencapaian target:

- Penyiapan infrastruktur untuk penanaman tebu di Lahan Non-HGU PTPN III, antara lain lahan Perhutani.
- Dukungan pendanaan kepada PTPN III dalam melakukan penyiapan infrastruktur terkait.
- Proses perizinan dan sinkronisasi program antar K/L belum optimal.
- Proses penetapan kesepakatan kerja sama antara PTPN III dengan pihak lain.
- Persaingan dengan Perusahaan Gula Swasta dalam melakukan kerja sama kemitraan dengan Petani Tebu Rakyat.
- Tantangan mendapatkan lahan yang sesuai dan potensial untuk menghasilkan produksi dan rendemen tebu yang tinggi.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, diantaranya:

- Adanya dukungan pendanaan kepada PTPN III melalui pinjaman lunak atau penyertaan modal negara (PMN).
- Kemudahan melakukan proses kerja sama penggunaan lahan Perhutani atau Kawasan Hutan.
- Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di area Perhutani untuk melakukan kerja sama dengan PTPN III dalam melakukan penanaman tebu.
- Kemudahan dalam melakukan proses kerja sama kemitraan dengan PTPN III, termasuk adanya kerja sama jual beli yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan Perusahaan Gula Swasta.
- Sinkronisasi program PTPN III dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah terkait dukungan pendanaan dari APBN untuk Petani Tebu Rakyat yang melakukan kerja sama kemitraan dengan PTPN III.
- Optimalisasi dan/atau adopsi penggunaan teknologi drone/gps/alat yang mendukung untuk melakukan pemetaan dan identifikasi lokasi lahan yang potensial untuk dilakukan penanaman tebu.

4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga

Latar Belakang

Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait stabilitas harga merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan lintas sektor dirumuskan dan dilaksanakan secara terkoordinasi dalam rangka menjaga stabilitas harga, khususnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional. Proses ini mencakup keselarasan antar pemangku kepentingan dalam merespons dinamika harga komoditas strategis agar tidak menimbulkan tekanan terhadap inflasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga, yaitu:

- **Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Pengendalian Inflasi.** Pemerintah secara berkelanjutan menyelenggarakan forum koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik melalui pertemuan reguler maupun forum strategis seperti Rakornas dan Rakorpusda. Upaya ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat peran TPID, serta memastikan pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Permenko Perekonomian No. 10/2017. Koordinasi ini juga mencakup penyusunan strategi jangka pendek dan menengah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan strategis.
- **Evaluasi Kinerja Daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga.** Untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kinerja daerah, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pengendalian inflasi daerah melalui mekanisme penilaian TPID Award. Evaluasi ini tidak hanya menilai pencapaian output, tetapi juga proses koordinasi, inovasi kebijakan, dan sinergi lintas sektor di daerah. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan lanjutan dan sebagai referensi dalam pemberian penghargaan atau insentif kepada daerah yang dinilai berhasil menjaga kestabilan harga secara efektif.
- **Penguatan Kapasitas TPID melalui Kegiatan Capacity Building.** Peningkatan kualitas kebijakan pengendalian inflasi turut didorong melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan TPID. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman daerah terhadap dinamika inflasi, pengelolaan pasokan dan distribusi, serta penggunaan instrumen kebijakan yang adaptif dan berbasis data. Melalui penguatan kelembagaan ini, TPID diharapkan mampu merespons gejolak harga secara cepat dan terkoordinasi, sekaligus meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan daerah yang mendukung stabilitas harga nasional.
- **Koordinasi Strategis Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).** Dalam mengantisipasi tekanan inflasi musiman selama periode Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, dilakukan koordinasi intensif dengan TPID dan kementerian/lembaga terkait. Langkah ini diimplementasikan melalui penyampaian surat imbauan, monitoring stok

dan distribusi pangan, serta penyiapan intervensi kebijakan jika diperlukan. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan usulan penerima insentif fiskal kepada Kementerian Keuangan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang mampu menjaga stabilitas harga selama periode tersebut.

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan stabilitas harga (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan stabilitas harga (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait stabilitas harga (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan stabilitas harga (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan I, 40% untuk triwulan II, 60% untuk triwulan III, dan 80% untuk triwulan IV.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 20% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Kinerja
IKU-4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga	Persentase	20%	20%	100% (Memuaskan)

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi kinerja **IKU-4.4 (Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga)** pada Triwulan I berhasil mencapai **20%** dari target yang ditetapkan sebesar **20%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan efektivitas organisasi dalam menyelaraskan dan mengendalikan kebijakan stabilitas harga.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi, surat keputusan, atau instrumen kebijakan resmi terkait pengendalian dan stabilitas harga pada Tw I.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi, serta Notulen Rapat (Minutes of Meeting) koordinasi lintas sektoral/tim pengendalian inflasi.
- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring harga berkala, evaluasi pasokan, serta matriks pengendalian kebijakan stabilitas harga di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Kualitas koordinasi yang baik memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Kebijakan yang sinkron berhasil menjaga tingkat inflasi tetap terkendali dalam rentang target sasaran pemerintah, yang pada gilirannya menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah) tetap stabil. Kepastian iklim harga yang terkontrol ini juga memberikan dampak psikologis positif bagi pasar, mengurangi spekulasi harga dari para pelaku usaha, serta menciptakan stabilitas sosial-ekonomi yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Realisasi Triwulan I didorong oleh tim internal IMAFKa yang solid, serta koordinasi yang baik dengan tim pengendali inflasi pusat bersama internal Kemenko maupun eksternal. Dengan kinerja yang baik tersebut dan rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya, diperkirakan target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/High Level Meeting TPIP	Terlaksana	Telah dilaksanakan HLM TPIP Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Perekonomian tanggal 31 Januari 2026
2.	Pelaksanaan proses evaluasi kinerja TPID tahun 2025 (TPID Award 2026)	Terlaksana	Telah dilaksanakan evaluasi kinerja TPID tahun 2025 ronde I tanggal 10-14 Maret 2026
3.	Penyampaian surat himbauan kepada TPID dan/atau K/L anggota TPIP terkait persiapan HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2026	Terlaksana	Telah dikirimkan surat No: PK.TPID/76/M.EKON /02.2026 tanggal 27 Februari 2026
4.	Capacity Building TPID	Terlaksana	Telah dilaksanakan di beberapa daerah
5.	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Analisis Inflasi Bulanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi dengan unit kerja dan K/L lain untuk mengupdate isu-isu terkini yang menjadi bahan analisis, melalui pencapaian target kinerja adalah:

- Pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Rakor TPIP-TPID di kawasan Jawa pada tanggal 21 Februari 2026
- Pelaksanaan capacity building dalam rangka pembinaan TPID maupun terkait evaluasi kinerja TPID

Capaian inflasi Maret 2026 sebesar 1,65 % (mtm) dan 1,03% (yoy), dipengaruhi oleh komoditas tarif listrik yang kembali normal (tanpa diskon) seiring dengan berakhirnya program pemberian diskon 50% dan mengalami inflasi sebesar 1,18%. Namun demikian, pelanggan pasca bayar masih mengalami penurunan harga atas konsumsi pada Maret 2026.

Berdasarkan komponen, komponen harga bergejolak (Volatile Food/VF) mengalami inflasi sebesar 1,96% (mtm) atau 0,37% (yoy). Secara bulanan, inflasi VF disumbang oleh komoditas bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, beras dan bawang putih.

Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,24% (mtm) atau 2,48% (yoy). Secara bulanan, inflasi inti utamanya disumbang oleh emas perhiasan. Sementara komponen Harga Diatur Pemerintah (Administered Price/AP) mengalami inflasi sebesar 6,53% (mtm) atau mengalami deflasi sebesar 3,16% (yoy). Secara bulanan, deflasi AP utamanya disumbang oleh tarif listrik dan tarif angkutan antarkota.

Efisiensi sumber daya:

Penggunaan anggaran yang belum bisa dipakai dalam pelaksanaan tugas pengendalian inflasi berdampak pada menurunnya intensitas koordinasi, yang pada gilirannya membatasi optimalisasi peran Kemenko Perekonomian dalam mengawal terjaganya inflasi dalam kisaran sasaran. Inflasi Indonesia pada triwulan I terkendali dalam kisaran sasaran. Oleh karena itu, pergerakan harga pangan dijaga dalam rentang hasil kesepakatan HLM TPIP yakni 3-5%.

Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan yang mengoptimalkan ruang rapat kantor dan metode daring maupun *hybrid* melalui *video conference*. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidental pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Kelompok *volatile food* (VF) mengalami peningkatan harga utamanya produk hortikultura yang dipengaruhi oleh keterbatasan produksi akibat gangguan cuaca seperti produksi bawang merah yang mengalami kendala akibat gangguan cuaca yang menyebabkan banjir di beberapa daerah sentra produksi terutama wilayah Pantura dan produksi cabai mengalami penurunan akibat gangguan cuaca yang terjadi di beberapa wilayah di antaranya di Jawa Tengah. Sementara peningkatan harga daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi dan beras didorong oleh kenaikan permintaan selama periode HBKN Idul Fitri.
- Inflasi inti tetap stabil disumbang oleh kenaikan permintaan pada masa HBKN Idulfitri yang terbatas dan ekspektasi inflasi yang menurun di tengah kenaikan tekanan dari sisi eksternal yang tecermin dari peningkatan beberapa harga komoditas global, terutama emas, dan pelemahan nilai tukar.

- Inflasi *administered price* (AP) didorong oleh adanya stimulus pemerintah untuk listrik dan jasa angkutan yang membawa kelompok AP mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

- Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2025 sampai dengan rapat Pleno.
- Melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana aksi pada triwulan II koordinasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, dan pelaksanaan rakor pusat dan daerah dengan subtransi tematik per kawasan.
- Pelaksanaan Capacity building dalam rangka pembinaan TPID maupun terkait evaluasi kinerja TPID.

4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Sektor Eksternal. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan yang dikoordinasikan dalam rangka mencapai Persentase Efektivitas Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Stabilitas Ekonomi dan Sektor Eksternal, yaitu:

- **Peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi** melalui penguatan sektor riil yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan padat karya;
- **Penguatan kinerja ekspor** melalui monitoring pelaksanaan kebijakan penempatan DHE serta peningkatan peran BUMN ekspor dalam memperluas akses pasar;
- **Pengawasan kebijakan sektor eksternal**, termasuk penguatan neraca transaksi berjalan sertaantisipasi dampak kebijakan eksternal seperti tarif ekspor-impor oleh negara mitra dagang (antara lain kebijakan tarif AS terhadap produk baja dan lainnya);
- **Peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional (LCT)** untuk mengurangi ketergantungan terhadap valuta asing dan menjaga stabilitas nilai tukar;
- **Stabilisasi harga komoditas strategis** melalui penguatan peran dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID).

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan sektor eksternal (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait kebijakan sektor eksternal (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait sektor eksternal (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permen/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait kebijakan sektor eksternal (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan I, 40% untuk triwulan III, 60% untuk triwulan III, dan 80% untuk triwulan IV.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 20% dari target Tahun 2026 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Kinerja
IKU-4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	Persentase	20%	20%	100% (Memuaskan)

kebijakan terkait Sektor Eksternal				
---------------------------------------	--	--	--	--

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi kinerja **IKU-4.5 (Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal)** pada Triwulan I berhasil mencapai **20%** dari target yang ditetapkan sebesar **20%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan optimalnya penyelarasan serta pengendalian kebijakan di bidang sektor eksternal.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi, surat keputusan, atau instrumen kebijakan resmi terkait kerja sama dan isu sektor eksternal yang disinkronisasikan pada TW I.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan rapat, daftar hadir, foto dokumentasi, serta Notulen Rapat (Minutes of Meeting) koordinasi lintas sektoral/lembaga.
- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring/evaluasi berkala serta matriks pengendalian implementasi kebijakan sektor eksternal di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Koordinasi upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4-5,6% untuk tahun 2026 menjadi lebih terintegrasi dan efektif. Laporan ekspor-impor tersusun lebih efisien dan efektif. Terjaganya investment credit rating Indonesia. Teridentifikasi dampak penerapan tarif resiprokal AS bagi perekonomian Indonesia lebih dini dan terarah. Penyusunan offering tarif bagi AS lebih fokus dan terarah. Penyempurnaan sistem informasi DHE SDA yang lebih efisien dan efektif.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

- **Triwulan I:** Telah dicapainya serangkaian kegiatan koordinasi strategis yang berkontribusi terhadap penajaman isu dan kebijakan terkait sektor eksternal.
- **Triwulan II:** Akan difokuskan pada Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal; Penyusunan Kajian Dampak Kebijakan Tarif Baru AS; Pelaksanaan Koordinasi Working Group (WG) Tarif dan Market Access; serta Koordinasi Penyusunan Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA.
- **Triwulan III:** Akan diarahkan pada Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal; Pelaksanaan Koordinasi Working Group (WG) Tarif dan Market Access; Sosialisasi DHE SDA, Koordinasi Penyusunan Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA; serta Koordinasi dan Sinkronisasi Kajian NTM Indonesia.
- **Triwulan IV:** Akan ditargetkan pada Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal; Evaluasi

DHE SDA; Penyusunan Kajian NTM Indonesia; serta Evaluasi Implementasi LCT.

Dengan pendekatan ini, **target tahunan IKU diproyeksikan tercapai**, mengingat bahwa pertemuan strategis di awal tahun telah membuka jalur koordinasi substansial dan berkelanjutan, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dengan didukung oleh tim internal IMAFka yang solid, serta koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait baik Internal Kemenko maupun eksternal.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Sektor Eksternal			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait bidang stabilitas ekonomi dan sektor eksternal	Terlaksana	- Telah disusunnya Laporan PDB triwulan IV tahun 2024 pada 5 Februari 2026 - Telah diselenggarakannya Rapat Koordinasi Evaluasi Pertumbuhan Triwulan 4 2024 dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi 2026 pada 6 Februari 2026 - Telah disusunnya Laporan Ekspor-Impor Indonesia Desember 2024 pada 15 Januari 2026, Laporan Ekspor-Impor Indonesia Januari 2026 pada 17 Februari 2026, dan Laporan Ekspor-Impor Indonesia Februari 2026 pada 17 Maret 2026. - Telah disusun bahan untuk Koordinasi

			Investment Credit Rating Indonesia pada pertemuan dengan Fitch (10 Februari 2026), Moody's (19 Februari 2026), serta bahan speech pimpinan, dll
2.	Monitoring implementasi kebijakan DHE SDA	Terlaksana	• Telah diselenggarakannya Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 (PP 36/2023) tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA pada 21, 22, 31 Januari 2026, dan 12, 14 Februari 2026 • Telah diselenggarakannya Sosialisasi Perubahan PP 3/2023 pada 24, 30 Januari 2026 dan 6, 7 Februari 2026 • Telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 (PP 8/2026) tentang Perubahan atas PP 36/2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA pada 17 Februari 2026

			Telah diselenggarakannya Sosialisasi PP 8/2026 pada 24,25, 26, 28 26 Februari 2026 dan 14, 19, 24 Maret 2026
--	--	--	--

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi dengan unit kerja dan K/L lain untuk mengupdate isu-isu terkini yang menjadi bahan laporan dan analisa serta tindak lanjut dari penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi.

Efisiensi sumber daya:

Sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting, sehingga biaya perjalanan dinas dan penggunaan sumber daya lainnya dapat ditekan, namun partisipasi aktif dan efektivitas pencapaian tujuan kegiatan tetap terjaga. Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Permintaan bahan pada waktu yang mendesak menjadi tantangan, untuk mempermudah koordinasi, kerja bersama dilakukan melalui aplikasi onedrive serta dibuat database update perekonomian terkini sehingga dapat langsung digunakan ketika dibutuhkan dalam menyusun suatu bahan.
- Penghematan anggaran pemerintah dapat membebani kinerja perekonomian untuk tahun 2026 sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar target pertumbuhan tercapai.
- Perang AS-Iran dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi global seiring kenaikan harga minyak global sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjaga kestabilan sektor eksternal Indonesia khususnya kinerja ekspor nasional.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain penguatan Tim Kerja dan peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai pelatihan serta penggunaan teknologi informasi termasuk one

drive. Terkait kebijakan DHE SDA, diperlukan monitoring atas implementasi PP 8/2026 untuk memastikan efektivitas kebijakan.

4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi adalah ukuran untuk menilai efektivitas dan kualitas pelaksanaan pemantauan serta evaluasi terhadap berbagai program stimulus ekonomi yang ditujukan untuk penguatan ekonomi masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara komprehensif, tepat waktu, akurat, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kebijakan.

Indeks ini mengukur berbagai dimensi kualitas monitoring dan evaluasi, antara lain: (1) ketepatan waktu pelaporan dan pemantauan, (2) akurasi dan validitas data yang dikumpulkan, (3) cakupan dan kedalaman analisis terhadap dampak program, (4) kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, serta (5) tingkat responsivitas dalam menindaklanjuti temuan evaluasi. Penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri (self-assessment) dan verifikasi oleh tim independen terhadap dokumen monitoring, laporan evaluasi, serta implementasi tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi yang membidangi stimulus ekonomi berperan dalam mengkoordinasikan proses monitoring dan evaluasi bersama Kementerian/Lembaga pelaksana program stimulus, melakukan analisis capaian dan dampak program, serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan. Koordinasi lintas K/L diperlukan untuk memastikan data dan informasi yang komprehensif dapat dikumpulkan dan dianalisis secara holistik. Adapun beberapa daftar stimulus yang dikoordinasikan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan antara lain:

1. Stimulus Lebaran 2026 mencakup diskon tarif transportasi senilai Rp911,16 miliar (diskon 30% kereta api dan angkutan laut)
2. Bantuan Pangan Feb-Mar 2026 berupa beras 10Kg dan Minyak Goreng 2L untuk 33,2jt KPM (Desil 1-4) disalurkan 1x dengan anggaran Rp14,09T
3. pencairan THR bagi ASN, TNI-Polri dengan estimasi total Rp55T, dan pekerja swasta diestimasi Rp124T
4. Bonus Hari Raya bagi mitra ojek daring dan kurir diestimasi Rp230M,
5. kebijakan WFA ASN untuk memperluas dampak ekonomi ke daerah

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan usaha BUMN bidang industri manufaktur, agro, farmasi, dan kesehatan diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;

- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 1 adalah undangan, daftar hadir, dan/atau notula rapat tentang identifikasi isu strategis kebijakan program stimulus ekonomi (1 paket dokumen).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program
- undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen yang ditargetkan selesai pada Tahap 2 adalah laporan hasil rapat koordinasi dengan K/L teknis & BUMN dalam rangka debottlenecking permasalahan terkait program stimulus ekonomi (1 paket dokumen).

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
- rumusan kelembagaan,
- rumusan perencanaan program,
- rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Implementasi Kebijakan terkait program stimulus ekonomi (1 paket dokumen).

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
- Kertas Kerja Kebijakan
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terkait program stimulus ekonomi (1 paket dokumen).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 20% untuk triwulan I, 40% untuk triwulan III, 60% untuk triwulan III, dan 80% untuk triwulan IV.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi IKU 4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi mencapai 20%, sesuai dengan target Triwulan I yang telah ditetapkan sebesar 20%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator pada Triwulan I mencapai 100% (Memuaskan), dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Kinerja
IKU-4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi	Persentase	20%	20%	100% (Memuaskan)

Narasi tabel pengukuran kinerja dan data dukung capaian kinerja.

Realisasi kinerja **IKU-4.6 (Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi)** pada Triwulan I berhasil mencapai **20%** dari target yang ditetapkan sebesar **20%**. Dengan capaian sebesar **100%**, indikator ini mendapatkan predikat **"Memuaskan"** yang mencerminkan efektivitas organisasi dalam menyelaraskan dan mengendalikan kebijakan stimulus ekonomi.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa **Data Dukung** utama, yaitu:

- **Aspek Kebijakan:** Salinan regulasi atau instruksi kerja terkait pelaksanaan program stimulus ekonomi pada TW II.
- **Aspek Koordinasi:** Undangan, daftar hadir, foto dokumentasi, dan Notulen Rapat terkait sinkronisasi lintas sektor.
- **Aspek Pengendalian:** Laporan monitoring/evaluasi berkala dan matriks keselarasan program di lapangan.

Kualitas/dampak dari capaian kinerja

Dari sisi kualitas, pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan mampu meningkatkan konsistensi pelaksanaan program stimulus ekonomi antar Kementerian/Lembaga sehingga potensi tumpang tindih kebijakan dapat diminimalkan dan proses implementasi menjadi lebih terarah.

Dari sisi dampak, koordinasi yang efektif menghasilkan percepatan penyelesaian isu lintas sektor, memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan, serta mendukung pelaksanaan program stimulus ekonomi secara tepat waktu sehingga memberikan kepastian dalam implementasi kebijakan pemerintah.

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

- **Triwulan I:** Telah dicapainya serangkaian kegiatan koordinasi strategis yang berkontribusi terhadap implementasi stimulus ekonomi di Triwulan I - 2026.
- **Triwulan II:** Akan diarahkan pada Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis implementasi stimulus ekonomi di Triwulan II - 2026.
- **Triwulan III:** Akan diarahkan pada Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis implementasi stimulus ekonomi di Triwulan III atau Semester II - 2026.
- **Triwulan IV:** Akan diarahkan pada Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis implementasi stimulus ekonomi di Triwulan III atau Semester II - 2026.

Dengan pendekatan ini, **target tahunan IKU diproyeksikan tercapai**, mengingat bahwa pertemuan strategis di awal tahun telah membuka jalur koordinasi substansial dan berkelanjutan, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dengan didukung oleh tim internal IMAFKa yang solid, serta koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait baik Internal Kemenko maupun eksternal.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Program Stimulus Ekonomi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Laporan / analisis / kajian / rekomendasi kebijakan terkait program stimulus ekonomi	Terlaksana	Bahan Paparan, Policy Matrix, Risalah, Surat Keterangan Pelaksanaan Stimulus
2.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Tw I	Terlaksana	1. Rapat Eselon I Stimulus Diskon Transportasi tentang Evaluasi Implementasi Stimulus Diskon Transportasi Periode Nataru 2025/2026 dan Persiapan Implementasi Diskon Transportasi Periode Libur Idul Fitri 2026 pada tanggal 27 dan 28 Januari 2026. 2. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Stimulus Ekonomi Pada Tanggal 29 Januari 2026. 3. Rakorses Tindak Lanjut RTM dan Persiapan Pelaksanaan Stimulus Diskon Transportasi dan Work From Anywhere (WFA) Periode Lebaran Idul Fitri 2026M/1447H pada tanggal 30 Januari 2026. 4. Rakorses Tindak Lanjut Persiapan Pelaksanaan Stimulus Ekonomi: Diskon Transportasi, Pembatasan Angkutan Barang Periode Lebaran dan Idul Fitri 1447H/2026M pada

			tanggal 6 Februari 2026. 5. Rakor Es1 – Akselerasi Belanja Program Prioritas APBN untuk Mendorong Pertumbuhan Triwulan I-2026 pada tanggal 9 Februari 2026. 6. Konferensi Pers Para Menteri terkait Capaian Ekonomi Tahun 2025, Stimulus Ekonomi Diskon Tarif Transportasi HBKN Idul Fitri, WFA dan Bantuan Pangan pada Tanggal 10 Februari 2026
3.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program stimulus ekonomi Tw I	Terlaksana	Kunjungan dalam rangka Diskusi Rencana Aksi Pemulihan Ekonomi pascabencana tanggal 6-7 Februari 2026

Upaya nyata untuk mencapai kinerja:

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah

1. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Kementerian/Lembaga pelaksana guna memastikan implementasi program stimulus ekonomi berjalan sesuai rencana.
2. Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan program stimulus ekonomi serta mengidentifikasi isu strategis yang memerlukan tindak lanjut.
3. Menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.
4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan lintas sektor melalui forum koordinasi teknis maupun rapat tingkat pimpinan..

Efisiensi sumber daya:

Sebagian besar kegiatan koordinasi dilaksanakan secara hybrid maupun virtual melalui pemanfaatan platform digital sehingga penggunaan anggaran perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat dapat dioptimalkan. Pendekatan tersebut tetap mampu menjaga efektivitas koordinasi serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Estimasi efisiensi biaya penyelenggaraan kegiatan berkisar antara Rp10.000.000 sampai dengan Rp25.000.000 untuk setiap kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui paket meeting. Efisiensi

tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi lain yang bersifat strategis maupun insidental.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Dinamika perkembangan kondisi ekonomi mengharuskan penyesuaian substansi kebijakan stimulus secara cepat.
- Perbedaan waktu penyampaian data dan informasi dari Kementerian/Lembaga memerlukan proses konsolidasi yang lebih intensif.
- Tingginya kebutuhan koordinasi lintas sektor memerlukan penguatan mekanisme monitoring dan tindak lanjut hasil rapat.

Upaya perbaikan pencapaian target:

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2026, beberapa upaya perbaikan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya antara lain:

- Meningkatkan intensitas koordinasi dan monitoring bersama Kementerian/Lembaga pelaksana untuk memastikan implementasi kebijakan stimulus berjalan sesuai target.
- Memperkuat mekanisme pelaporan dan pertukaran data pelaksanaan program stimulus ekonomi guna meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi.
- Meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi implementasi program stimulus ekonomi.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi, dokumentasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil rapat.

5

Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Penyelenggar aan Sinkronisasi, Koordinasi,

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ *Stakeholder* terkait.

**dan
Pengendalian
di Bidang
Pengembangan
Badan
Usaha Milik
Negara
Bidang
Industri
Manufaktur,
Agro, Farmasi,
dan
Kesehatan**

Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Kepuasan consumer akan masuk kategori terpenuhi apabila hasil indeks pada survey pelayanan yang sudah diberikan kepada stakeholder mendapatkan nilai akhir minimal tiga (3) dari skala empat (4)

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian}}{\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian}} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Penetapan target 3 atau “puas” tahun 2026 ditetapkan untuk memastikan bahwa penerima layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai harapan. Adapun penetapan target dilakukan secara semesteran sebesar 3 dari 4, atau setidaknya dapat mempertahankan capaian semester sebelumnya.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, belum dilakukan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi. Hal ini dikarenakan sesuai dengan dokumen Rencana Aksi pada triwulan I untuk IKU Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan, masih dilakukan Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan Semester I 2026. Berdasarkan capaian Asdep Moneter dan Sektor Eksternal Triwulan IV tahun 2024, IKU 4.1: indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan mencapai telah terealisasi sebesar 3 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Kinerja
IKU-5.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	100%

Proyeksi capaian IKU per triwulanan dan keterkaitannya terhadap capaian target tahunan

Persiapan survei dalam rangka memperoleh angka realisasi capaian Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan tercapai berdasarkan koordinasi yang baik antara pegawai di Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dengan stakeholder terkait. Dengan mempertahankan koordinasi yang baik tersebut, diperkirakan target tahunan akan tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Tindak lanjut hasil survei Semester II 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan dialog kinerja triwulan I pada 27 Februari 2026, yang diantaranya membahas hasil survei semester II 2025 dan upaya perbaikannya

2.	Persiapan survei kepuasan layanan Semester I-2026	Terlaksana	Dilakukan pemetaan calon responden survei dari stakeholder yang berkoordinasi baik dengan tim kerja keasdepan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan
3.	Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan baik formal maupun informal)	Terlaksana	Telah dilaksanakan sepanjang triwulan I secara tatap muka maupun daring melalui partisipasi aktif dalam rapat formal dan diskusi kelompok guna membangun kedekatan, menyelaraskan persepsi, serta mempercepat pengambilan keputusan bersama pemangku kepentingan utama.
4.	Penyampaian Data dan Informasi Pengendalian Inflasi kepada pihak eksternal	Belum Terlaksana	Belum ada surat permohonan data dari pihak eksternal

Upaya Nyata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah keikutsertaan pegawai keasdepan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dalam kelompok kerja milik unit kerja lain sehingga turut meningkatkan partisipasi aktif dan koordinasi yang baik.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

1. Sebagian pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* menggunakan media komunikasi telekonferens (*online*) sehingga perjalanan dinas luar kota dilaksanakan selektif sesuai dengan urgensi.
2. Pemberkasan administrasi persuratan sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan media penyimpanan cloud sehingga sudah tidak memerlukan banyak peralatan ATK seperti kertas ataupun lemari untuk administrasi surat-surat tersebut.

Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Sasaran Strategis 6: Terwujudnya tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Pelaksanaan

Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Latar Belakang

Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rencana Aksi Asisten Deputi terkait pemenuhan Rencana Aksi RB di antaranya:

1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
2. Tingkat Maturitas SPIP
3. Nilai SAKIP
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Tingkat Digitalisasi Arsip

Dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan RB di lingkungan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai:
 - SK Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan terkait Tim Kerja (1 paket dokumen)
2. Tingkat Digitalisasi Arsip:
 - Dokumen naskah masuk dan keluar melalui Srikandi (4 dokumen triwulanan)
3. Capaian IKU (Capaian Akuntabilitas Kinerja)
 - Dokumen pelaksanaan Dialog Kinerja (4 dokumen triwulanan)
4. Survei Penilaian Integritas (SPI)

- Jumlah Pegawai yang mengisi Survey SPI (1 dokumen)

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 85% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada rencana aksi keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan tahun 2026 yang berpedoman pada manual IKU. Untuk target capaian pelaksanaan renaksi RB tahun 2026 didasarkan pada dokumen manual IKU yang telah disepakati bersama yaitu sebesar 85%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 23,53% dari target Tahun 2026 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Kinerja
IKU-6.1 Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Persentase	20%	20%	100% (Memuaskan)

Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan merupakan *cascading direct* dari indikator persentase pemenuhan dokumen yang menjadi bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 85%. Sampai dengan laporan ini disusun, persentase

pemenuhan dokumen yang menjadi bukti pelaksanaan RB di keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan sudah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang disusun pada awal tahun dan telah disepakati bersama. Terdapat lima inisiatif strategis yang mendasari pemenuhan dokumen pelaksanaan RB di keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan, antara lain:

- a) Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai;
- b) Tingkat Maturitas SPIP;
- c) Nilai Indeks SAKIP;
- d) Indeks Perencanaan Pembangunan;
- e) Tingkat Digitalisasi Arsip

Kelima inisiatif strategis didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik di lingkungan keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan. Selain itu, inisiatif strategis ini dipetakan berdasarkan jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung pada level keasdepan. Pada triwulan I-2026, fokus pelaksanaan RB dilakukan pada inisiatif:

- 1) Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
- 3) Penyusunan Renja 2026
- 4) Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

Pada inisiatif terlaksananya sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dilakukan rencana aksi yaitu: pembentukan tim kerja dalam memenuhi target kinerja yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) Tim Kerja yang ada di keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

Lebih lanjut, untuk inisiatif terlaksananya penggunaan arsip digital dilakukan melalui rencana aksi berupa optimalisasi implementasi SRIKANDI yang dibuktikan dengan pengarsipan naskah masuk dan naskah keluar melalui SRIKANDI, pemberian disposisi dari pimpinan, dan penyimpanan dokumen arsip aktif pada *cloud computing* sebagai *back up* data arsip aktif secara digital yang bis diakses untuk seluruh pegawai keasdepan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.

Selain itu, untuk inisiatif terlaksananya pemantauan capaian IKU (Capaian akuntabilitas kinerja) dilakukan melalui monitoring capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan dialog kinerja yang dibuktikan dengan pengadministrasian dan dokumentasi pelaksanaan dialog kinerja yang diadakan setiap triwulanan yang dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan maupun pejabat fungsional lainnya melalui masing-masing tim kerja.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Belum Terlaksana	Perjanjian Kinerja, Renaksi, dan Manual IKU baru selesai dibuat pada April 2026, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan baru bisa dimulai pada Triwulan II
2.	Penyusunan Renja 2026	Terlaksana	Telah ada arahan dari unit Sekretaris Deputi untuk penyusunan Renja 2026
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Implementasi Srikandi dilakukan untuk administrasi pemberkasan surat masuk maupun keluar.

Upaya Nyata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah keikutsertaan pegawai keasdepan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan dalam masing-masing kelompok kerja untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

- Sebagian pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* menggunakan media komunikasi telekonferens (*online*), sehingga perjalanan dinas luar kota dilaksanakan selektif sesuai dengan urgensi.
- Pemberkasan administrasi persuratan sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan media penyimpanan cloud sehingga sudah tidak memerlukan banyak peralatan ATK seperti kertas ataupun lemari untuk administrasi surat-surat tersebut.

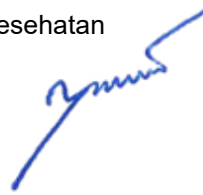
Proyeksi efisiensi diperkirakan mencapai Rp10.000.000,- hingga Rp25.000.000,- untuk setiap kegiatan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lain yang sifatnya lebih strategis dan insidentil pada periode berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 10 Juli 2026

Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang
Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan
Kesehatan



Mochamad Edy Yusuf